



PKL Malioboro Akan Direlokasi 1-7 Februari 2022

YOGYA (MERAPI) - Pedagang kaki lima Malioboro menyebut proses relokasi akan dilakukan pada awal Februari 2022 berdasarkan hasil pertemuan terakhir yang dilakukan dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

"Rencananya akan dilakukan relokasi pada 1-7 Februari 2022. Sebelumnya akan ada semacam acara selamatan di Gedung Indra pada 22 Januari," kata Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto, Jumat (14/1).

Ia menambahkan, seluruh pedagang kaki lima akan dipindahkan ke lokasi baru sehingga jika pada 8 Februari masih ada pedagang yang berjualan di lokasi lama maka akan langsung ditertibkan oleh aparat gabungan.

Meskipun pedagang menerima rencana untuk relokasi, namun Yati masih berharap agar pemerintah bisa menunda kebijakan tersebut selama satu hingga tiga tahun untuk memberikan kesempatan kepada pedagang memulihkan kondisi perekonomian mereka.

"Pandemi membuat kami terpuruk karena ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga wisatawan pun sepi," ujarnya dilansir Antara.

*** Bersambung ke halaman 9**



MERAPI-ANTARA FOTO/Hendra Nurdiansyah

Pekerja memasang instalasi listrik di lokasi los relokasi pedagang kaki lima Malioboro, Yogyakarta, Selasa (4/1/2022). Pemda DI Yogyakarta dan Pemkot Yogyakarta berencana memindahkan 1.700 PKL Malioboro di eks gedung-bioskop Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY pada Januari 2022.

Namun demikian, lanjut dia, kondisi pariwisata di Yogyakarta kembali berangsur pulih dan Malioboro kembali ramai dikunjungi wisatawan sehingga pedagang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulihkan kondisi ekonomia mereka. "Kekhawatiran kami saat dipindah ke gedung baru, maka wisatawan enggan datang. Bisa membuat kami mati perlahan-lahan," katanya.

Pedagang masih berharap agar konsep penataan PKL di kawasan Malioboro tidak dilakukan dengan cara relokasi tetapi "mempercantik" lokasi berjualan PKL. "Misalnya dengan seragam yang bagus, gerobak yang sama atau urutannya. Jadi tidak perlu dipindah tetapi dipercantik saja. Apalagi kami yang jualan kuliner tidak bersinggungan langsung dengan toko," kata Yati yang sudah berjualan selama 18 tahun di Malioboro.

Selain itu, Yati juga menyoroti luasan lapak yang nantinya akan ditempati pedagang di lokasi baru karena ukurannya terbatas 1,15 x2 meter persegi dan hanya ada satu pintu tiap dua lapak sehingga rentan menimbulkan konflik antar pedagang terlebih jika pemilik lapak berbeda. "Juga tidak ada kompensasi yang diterima pedagang untuk relokasi," katanya.

Selain di bekas Gedung Bioskop Indra, pemerintah daerah juga menyiapkan lokasi lain untuk relokasi PKL Malioboro yaitu di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Total terdapat sekitar 1.700 pedagang kaki lima Malioboro yang akan

direlokasi ke dua lokasi tersebut.

Pemda DIY berharap, rencana relokasi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan tempat yang lebih aman dan nyaman bagi PKL untuk menjalankan aktivitas jual beli.

Selain itu, relokasi juga ditujukan untuk menata kawasan Malioboro karena Pemda DIY mengajukan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan, rencana relokasi PPKL di kawasan Malioboro sebagai upaya memuliakan pelaku usaha agar mendapatkan tempat yang lebih representatif.

"Kami ini kan Pemda memulihkan mereka, bagaimana memberikan ruang yang legal, representatif," kata

Siwi, sapaan akrab Srie Nurkyatsiwi menjelaskan sebanyak 1.700 PKL yang membuka lapak di sisi barat dan sisi timur Malioboro bakal direlokasi ke dua lokasi yang telah disiapkan.

Lokasi pertama yakni di Gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan, Kota, Yogyakarta dan lokasi kedua menempati bekas Kantor Gedung Dinas Pariwisata DIY. Keduanya masih berada di kawasan Malioboro. "Yang eks

(gedung) pariwisata itu sementara sambil Pemda menyiapkan lokasi yang nanti permanen," kata Siwi.

Ia berharap relokasi tidak dimaknai sebagai upaya pengusiran, melainkan justru menghadirkan keamanan dan kenyamanan berdagang bagi PKL. "Menyiapkan tempat, ruang, tidak ada retribusi, sewa untuk waktu tertentu itu kan bentuk afirmasi Pemda," tutur Siwi.

Selain mewujudkan kenyamanan pedagang, Siwi menuturkan relokasi tersebut bertujuan menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari upaya Pemda DIY mengajukan kawasan sumbu filosofi DIY sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. "Resistensi itu pasti ada, tapi kan proses ini terus berjalan," ucap Siwi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyatakan DPRD DIY mendukung proses relokasi dengan tujuan untuk penataan kawasan Malioboro. Dengan kawasan Malioboro yang tertata sehingga menarik lebih banyak pengunjung, ia yakin omzet PKL di kawasan itu akan meningkat.

Sebelum relokasi dilaksanakan, Huda meminta Pemda DIY membuka ruang komunikasi sembari menyosialisasikan secara mendetail mengenai konsep relokasi dan penataan kawasan tersebut. Ia menilai

wajar jika ada sebagian PKL yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan itu masih khawatir omzetnya bakal menurun lantaran belum menerima informasi yang mendetail.

"Sampai pada konsep PKL A dapat lokasi di mana, penataan lokasinya seperti apa, daya tamponnya, serta promosinya nanti bagaimana harus disampaikan secara mendetail dan cermat," ujar politisi PKS ini.

Sejumlah PKL di kawasan Malioboro sempat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pada Selasa (11/1) untuk memperoleh pendampingan advokasi atas rencana relokasi itu. Salah satu PKL Malioboro Supriyanti mengaku tidak menolok rencana relokasi itu melainkan berharap ada transparansi dari pemerintah serta penundaan waktu relokasi.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait waktu relokasi dan hanya mengetahui informasi mengenai rencana waktu pemindahan dari media sosial.

Selain alasan kesiapan lapak, PKL beralasan penundaan dibutuhkan karena pedagang khawatir omzetnya menurun jika harus pindah ke lokasi baru. "Apalagi kami benar-benar terdampak pandemi Covid-19," ujar Supriyanti. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005